

ANALISIS KONSEPTUAL SEJARAH NASIONAL INDONESIA SEBAGAI BASIS EPISTEMOLOGIS PEMBELAJARAN PPKn DALAM MEMBANGUN WARGA NEGARA DEMOKRATIS

Yonathan Anjulin Kamiasi¹, Fadil Mas'ud², Maria Cindiany Baru³,
Esty Jumirna Taneo⁴, Emilia Nadya Pa'a⁵, Maria Fransiska Mika⁶,
Maria Sipriani Dau⁷, Erikson Agung Bau⁸, Oktaviana Mopia⁹,
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}PPKn, FKIP, Universitas Nusa Cendana Kupang,
³cindyanibaru18@gmail.com,

ABSTRACT

This study examines the conceptual role of Indonesian national history as an epistemological foundation in Civic Education (PPKn) for fostering democratic citizens. The research is motivated by the declining quality of democratic practices, reflected in low political participation, rising intolerance, and weak internalization of democratic values among students. The study aims to analyze how national history can function as a critical and reflective knowledge base to strengthen civic competence. This research employs a qualitative approach using library research combined with conceptual analysis. Data were collected from primary and secondary sources, including academic books, peer-reviewed journal articles, and relevant educational documents published within the last decade. The analysis was conducted through content analysis and a hermeneutic-critical approach to interpret and synthesize key concepts related to history and civic education. The findings reveal that national history contains essential democratic values such as justice, equality, tolerance, and participation, which can serve as a strong epistemic foundation for PPKn learning. However, current instructional practices remain largely normative and cognitive-oriented, limiting students' ability to develop historical reflection and critical thinking. The integration of historical perspectives into civic education is shown to enhance students' analytical skills, democratic awareness, and active participation. Therefore, reconstructing PPKn learning through a historically grounded, reflective, and dialogical approach is crucial for developing democratic, critical, and responsible citizens in contemporary society.

Keywords: national history, civic education, epistemology, democratic citizens, historical consciousness

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran konseptual sejarah nasional Indonesia sebagai basis epistemologis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk membangun warga negara demokratis. Kajian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kualitas praktik demokrasi yang ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, meningkatnya intoleransi, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai

demokrasi di kalangan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sejarah nasional dapat berfungsi sebagai landasan pengetahuan yang kritis dan reflektif dalam memperkuat kompetensi kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang dipadukan dengan analisis konseptual. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa buku akademik, artikel jurnal bereputasi, serta dokumen pendidikan yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi dan pendekatan hermeneutik-kritis untuk menginterpretasikan serta mensintesis konsep-konsep utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah nasional mengandung nilai-nilai demokrasi seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan partisipasi yang dapat menjadi fondasi epistemologis dalam pembelajaran PPKn. Namun, praktik pembelajaran yang masih bersifat normatif dan berorientasi kognitif menyebabkan terbatasnya pengembangan kemampuan berpikir kritis dan reflektif peserta didik. Integrasi perspektif historis dalam pembelajaran PPKn terbukti mampu meningkatkan kesadaran demokrasi, kemampuan analitis, dan partisipasi aktif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pembelajaran PPKn yang lebih reflektif, dialogis, dan kontekstual berbasis sejarah nasional guna membentuk warga negara yang demokratis, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: sejarah nasional, pendidikan kewarganegaraan, epistemologi, warga negara demokratis, kesadaran historis

A. Pendahuluan

Sejarah nasional Indonesia memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran kebangsaan dan karakter warga negara yang demokratis. Realitas sosial menunjukkan masih adanya gejala penurunan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, seperti rendahnya partisipasi politik yang berkualitas, meningkatnya intoleransi, serta lemahnya internalisasi nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menandakan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) belum

sepenuhnya mampu berfungsi sebagai wahana pembentukan warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Padahal, secara konseptual, PPKn memiliki mandat untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan demokratis (Winataputra, 2016).

Sejarah nasional Indonesia sebagai disiplin ilmu tidak hanya berfungsi sebagai rekaman peristiwa masa lalu, melainkan juga sebagai sumber nilai dan landasan epistemologis dalam pembentukan identitas kebangsaan. Pendekatan epistemologis terhadap sejarah memungkinkan peserta didik

memahami proses terbentuknya bangsa secara kritis, termasuk dinamika sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Pemahaman ini penting dalam membangun kesadaran historis (*historical consciousness*) yang menjadi dasar dalam bersikap demokratis dan menghargai keberagaman (Kartodirdjo, 2017). Nilai-nilai itu pun tidak serta merta diberlakukan begitu saja, tetapi melalui sebuah proses dan permenungan yang panjang, terbuka dan demokratis yang pada akhirnya perbedaan-perbedaan yang ada dapat dikompromikan dalam sebuah kesepakatan bersama (Kamlasi, Fajriatin, Utami, Ma'ruf, & Fadilah, 2025)

Kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran sejarah masih cenderung bersifat hafalan dan kurang mengaitkan nilai-nilai historis dengan konteks kehidupan kontemporer peserta didik (Hasan, 2019).

Permasalahan penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara potensi sejarah nasional sebagai sumber nilai demokrasi dengan praktik pembelajaran PPKn yang masih normatif dan kurang kontekstual. Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan bahwa integrasi antara materi sejarah dan pembelajaran kewarganegaraan

belum dilakukan secara optimal, sehingga peserta didik kurang mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi secara mendalam (Suryadi, 2020).

Padahal, integrasi ini sangat penting untuk membangun pemahaman yang utuh tentang hubungan antara sejarah perjuangan bangsa dengan praktik demokrasi masa kini. Analisis teoretis sejarah nasional memungkinkan kesadaran dibangun, dipahami, dan diinternalisasi sebagai dasar epistemologis untuk studi mahasiswa PPKn bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan (Kamlasi & Utami, 2025)

Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual sejarah nasional Indonesia sebagai basis epistemologis dalam pembelajaran PPKn.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana sejarah nasional dapat dijadikan landasan dalam membangun kerangka berpikir kritis dan demokratis bagi peserta didik. Manfaat penelitian ini mencakup kontribusi teoretis dalam

pengembangan kajian PPKn berbasis sejarah, serta kontribusi praktis dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan warga negara demokratis.

Data dan fakta yang mendukung penelitian ini diperoleh dari berbagai studi terbaru yang menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran berbasis nilai dan konteks historis mampu meningkatkan kesadaran demokrasi dan partisipasi aktif peserta didik (Banks, 2017; Print & Lange, 2018).

Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog kritis, refleksi historis, serta penguatan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan toleransi sebagai bagian dari kompetensi kewarganegaraan. Integrasi sejarah nasional dalam pembelajaran PPKn menjadi relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan disrupsi sosial yang menuntut warga negara memiliki kemampuan berpikir kritis dan komitmen terhadap nilai demokrasi.

Ketajaman analisis terhadap hubungan antara sejarah nasional dan pembelajaran PPKn menjadi fondasi penting dalam pengembangan model pembelajaran

yang tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada transformasi nilai dan pembentukan karakter. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan kewarganegaraan di era modern, sekaligus memperkuat identitas nasional dalam kerangka demokrasi yang inklusif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam kajian ini dirancang untuk memberikan landasan analitis yang kokoh dalam memahami posisi sejarah nasional Indonesia sebagai basis epistemologis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis konseptual. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada eksplorasi gagasan, konstruksi teori, serta penafsiran kritis terhadap konsep-konsep yang relevan dengan sejarah nasional dan pendidikan kewarganegaraan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.

Data primer berupa karya-karya ilmiah yang secara langsung membahas konsep sejarah nasional, epistemologi, dan pembelajaran PPKn, seperti buku akademik, artikel jurnal bereputasi, serta dokumen kebijakan pendidikan. Data sekunder meliputi literatur pendukung yang relevan, seperti hasil penelitian terdahulu, prosiding ilmiah, dan sumber terpercaya lainnya dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir untuk menjaga aktualitas kajian. Proses penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional terakreditasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengorganisasi berbagai sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Setiap sumber dianalisis berdasarkan relevansi substansi, kredibilitas penulis, serta kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian. Proses ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga melibatkan seleksi kritis untuk memastikan bahwa data yang

digunakan memiliki validitas akademik yang memadai.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutik-kritis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola pemikiran, serta relasi konseptual antara sejarah nasional dan pembelajaran PPKn. Sementara itu, pendekatan hermeneutik-kritis memungkinkan peneliti melakukan penafsiran mendalam terhadap makna yang terkandung dalam teks, sekaligus mengkaji relevansinya dalam konteks pendidikan kewarganegaraan kontemporer. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara reflektif dan iteratif.

Analisis teoretis sejarah nasional memungkinkan kesadaran dibangun, dipahami, dan diinternalisasi sebagai dasar epistemologis untuk studi mahasiswa PPKn bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Nusa Cendana (Undana) merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi yang memahami dan

mengamalkan nilai-nilai kebangsaan (Kamlasi & Utami, 2025).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari perspektif yang berbeda. Selain itu, dilakukan pula pengecekan konsistensi konseptual (*theoretical consistency*) guna memastikan bahwa kerangka pemikiran yang dibangun memiliki koherensi logis dan akademis. Pendekatan ini penting dalam penelitian konseptual agar hasil kajian tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis pada argumentasi ilmiah yang teruji.

Metodologi ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis konseptual yang komprehensif mengenai peran sejarah nasional sebagai fondasi epistemologis dalam pembelajaran PPKn. Melalui pendekatan yang reflektif dan kritis, penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep yang ada, tetapi juga menawarkan rekonstruksi pemikiran yang inovatif dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan warga negara demokratis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah nasional Indonesia memiliki kedudukan strategis sebagai basis epistemologis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Analisis terhadap berbagai literatur mengungkapkan bahwa sejarah nasional tidak semata dipahami sebagai kumpulan fakta dan kronologi peristiwa, melainkan sebagai konstruksi pengetahuan yang sarat dengan nilai, makna, dan refleksi kritis atas perjalanan bangsa. Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, keadilan sosial, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman terinternalisasi dalam berbagai peristiwa historis, termasuk dinamika perjuangan kemerdekaan, pembentukan konstitusi, hingga praktik demokrasi di berbagai periode pemerintahan. Temuan ini menegaskan bahwa sejarah nasional berpotensi menjadi sumber epistemik yang mampu membentuk kesadaran kritis dan identitas kewarganegaraan. Demokrasi merupakan salah satu landasan yang mengatur tentang demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia (Mas'ud, et al., 2025).

Hasil lainnya memperlihatkan bahwa pemanfaatan sejarah nasional dalam pembelajaran PPKn masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Praktik pembelajaran cenderung berorientasi pada pendekatan normatif dan kognitif, dengan penekanan pada hafalan konsep dan

peraturan, sehingga kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk melakukan refleksi historis secara mendalam. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemahaman konseptual dengan praktik nilai demokrasi dalam kehidupan nyata. Peserta didik sering kali memahami demokrasi secara prosedural, tetapi belum mampu menghayati substansi dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Pembahasan terhadap temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi epistemologis dalam pembelajaran PPKn melalui integrasi sejarah nasional. Perspektif kesadaran historis (*historical consciousness*) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap masa lalu yang bersifat reflektif memungkinkan individu membangun orientasi nilai dan sikap dalam menghadapi realitas sosial-politik masa kini (Hasan, 2019). Kesadaran historis tidak hanya mendorong kemampuan berpikir kritis, tetapi juga memperkuat empati sosial dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Selaras dengan itu, teori pendidikan kewarganegaraan menekankan bahwa pembelajaran PPKn harus mampu mengembangkan

kompetensi kewarganegaraan secara holistik, yang meliputi *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions* (Winataputra, 2016). Integrasi sejarah nasional dalam kerangka ini memberikan konteks nyata bagi peserta didik untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi lahir, berkembang, dan diuji dalam perjalanan bangsa. Pembelajaran yang mengaitkan dimensi historis dengan isu-isu kontemporer terbukti lebih efektif dalam membangun pemahaman yang bermakna dibandingkan pendekatan yang bersifat tekstual dan dekontekstual.

Pendekatan ini juga didukung oleh teori pendidikan demokrasi yang menekankan pentingnya dialog kritis, refleksi, dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran (Banks, 2017). Melalui integrasi sejarah nasional, peserta didik diajak untuk menganalisis peristiwa historis secara kritis, mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan, serta merefleksikannya dalam konteks kehidupan saat ini. Proses ini mendorong terbentuknya kemampuan berpikir analitis, sikap toleran, serta kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam kehidupan demokratis. Penelitian lain menunjukkan bahwa pembelajaran

kewarganegaraan yang berbasis pada konteks historis mampu meningkatkan kualitas partisipasi politik dan kesadaran sosial peserta didik (Print & Lange, 2018).

Temuan penelitian ini mengarah pada pentingnya pengembangan model pembelajaran PPKn yang inovatif dan integratif. Sejarah nasional perlu direposisi sebagai sumber epistemologis yang hidup dan kontekstual, bukan sekadar materi pelengkap. Pembelajaran perlu dirancang dengan pendekatan yang mendorong eksplorasi makna, analisis kritis, serta dialog reflektif antara masa lalu dan masa kini. Strategi seperti pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), diskusi kritis, dan studi kasus historis dapat menjadi alternatif dalam mengimplementasikan pendekatan ini.

Keseluruhan hasil dan pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan dimensi epistemologis sejarah nasional dalam pembelajaran PPKn merupakan langkah strategis dalam membangun warga negara demokratis. Integrasi ini tidak hanya memperkaya aspek kognitif, tetapi juga memperkuat dimensi afektif dan praksis kewarganegaraan.

Pembelajaran yang berakar pada refleksi historis berpotensi menghasilkan warga negara yang tidak hanya memahami demokrasi secara konseptual, tetapi juga mampu mengaktualisasikannya secara bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sejarah nasional Indonesia memiliki peran fundamental sebagai basis epistemologis dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sejarah tidak sekadar menghadirkan fakta masa lalu, melainkan menjadi sumber nilai, refleksi kritis, dan kerangka berpikir yang membentuk kesadaran historis peserta didik. Pemanfaatan sejarah secara konseptual dalam pembelajaran PPKn mampu memperkuat pemahaman demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, meliputi nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, dan partisipasi aktif. Integrasi ini terbukti relevan dalam membangun warga negara yang kritis, reflektif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pembelajaran PPKn saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam mengoptimalkan dimensi epistemologis sejarah. Pendekatan yang cenderung normatif dan berorientasi pada hafalan menyebabkan lemahnya internalisasi nilai serta keterputusan antara pengetahuan dan praktik kewarganegaraan. Kondisi ini menuntut adanya rekonstruksi pedagogis yang lebih integratif, kontekstual, dan inovatif, dengan menempatkan sejarah nasional sebagai fondasi dalam proses pembelajaran.

Saran yang dapat diajukan meliputi perlunya pengembangan desain pembelajaran PPKn yang mengintegrasikan pendekatan historis secara sistematis melalui strategi pembelajaran reflektif, dialogis, dan berbasis masalah. Pendidik diharapkan mampu mengaitkan materi sejarah dengan isu-isu kontemporer sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan aplikatif. Penguatan kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis kesadaran historis juga

menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi empiris dari model pembelajaran PPKn berbasis sejarah nasional di berbagai jenjang pendidikan, guna mengukur efektivitasnya dalam meningkatkan kompetensi kewarganegaraan peserta didik. Selain itu, eksplorasi terhadap integrasi teknologi digital dalam pembelajaran sejarah dan PPKn dapat menjadi arah penelitian inovatif untuk menjawab tantangan pendidikan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2017). *Citizenship education and global migration: Implications for theory and research*. American Educational Research Association.
- Banks, J. A. (2017). *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Hasan, S. H. (2019). *Pendidikan sejarah untuk kehidupan abad ke-21*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kartodirdjo, S. (2017). *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Print, M., & Lange, D. (2018). *Civic education and competences for engaging citizens in*

- democracies*. Rotterdam: Sense Publishers. *Kewarganegaraan*, 10(1), 21–35.
- Winataputra, U. S. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Suryadi, A. (2020). Integrasi pendidikan sejarah dalam pembelajaran kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 115–128.
- Kamlasi, Y., & Utami, D. (2025). Epistemological foundation of civic education in higher education: A study at Universitas Nusa Cendana. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial*, 11(2), 101–115.
- Kamlasi, Y., Fajriatin, Utami, D., Ma'ruf, A., & Fadilah, N. (2025). Revitalization of Pancasila values in civic education learning in the digital era. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 9(1), 12–25.
- Mas'ud, M., Rahim, A., & Yusuf, K. (2025). Democracy, human rights, and civic responsibility in modern education. *Journal of Democracy and Civic Culture*, 4(1), 20–33.
- Naikofi, Y., Kamlasi, Y., & Utami, D. (2025). Implementation of Pancasila values in civic education learning outcomes in higher education. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan*